



OPD Diajak Pertahankan WTP





Perbaiki Manajemen Pengelolaan Aset

SINGKAWANG, SP - Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan mengatakan, pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis.

Demi mencapai tujuan tersebut Pemerintah Kota Singkawang dianggap perlu mempersiapkan aparturnya, untuk menghadapi perubahan dan mendorong pelaksanaan tata kelola aset daerah sesuai dengan peraturan efektif, efisien, transparan dan akuntabel agar laporan keuangan menuju pemerintah yang baik.

Selain itu, untuk menunjang keberhasilan tata kelola barang milik daerah yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan dukungan, komitmen partisipasi dan tanggungjawab dari semua pihak.

"Untuk itu saya minta seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan sungguh-sungguh," kata Irwan, saat membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di Aula Hotel Dangau Resort Singkawang, Selasa (25/9).

Menerima penjelasan sungguh-sungguh, agar dapat mencermati dan melaksanakan segala aturan dalam pengelolaan barang daerah sehingga dapat memahaminya dengan baik dan melaksanakannya dengan benar semua aturan yang berlaku. Sebab, para pengurus barang merupakan ujung tombak dalam pengelolaan aset daerah.

"Kepada para pejabat pengelola aset atau barang milik daerah di satuan kerja masing-

masing lakukanlah pengelolaan aset daerah dengan baik dan benar. Sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi," pesannya.

Untuk itu azas-azas pengelolaan aset tersebut baik itu azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai harus menjadi pegangan dalam pelaksanaannya.

"Karena ini sangat berpengaruh pada penilaian/opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Terlebih lagi dalam tahun ini Kota Singkawang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK," ungkapnya.

Pencapaian WTP tersebut tentunya merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja.

"Tidak terkecuali dalam penatausahaan aset daerah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah Singkawang, Muslimin mengatakan, sosialisasi Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, adalah dalam rangka menambah wawasan dan pemahaman semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta pengurus barang dan fungsi terkait dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) di lingkup instansi masing-masing.

Selain itu, sosialisasi Permendagri ini juga guna menguatkan komitmen para kepala OPD dan jajarannya untuk semakin tertib dalam penatausahaan BMD sehingga pelaporan BMD yang menjadi satu kes-

atuan dalam laporan keuangan Pemda (LKPD) pada akhir tahun 2018 akan semakin baik, tertib dan akuntabel.

"Sehingga dalam sosialisasi ini kita mengundang semua kepala OPD, pejabat penatausahaan barang SKPD dan para pengurus barang masing-masing SKPD, harapannya agar Opini BPK RI yakni WTP dapat dipertahankan di tahun 2018," ujarnya.

Sementara narasumber yang didatangkan pada sosialisasi ini dari Ditjen Administrasi Keuangan Daerah (BKAD) Kemendagri dan Biro Aset Setda Provinsi Kalbar. (rud/ang)